

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN : Mediator Hubungan Industrial
2. KODE JABATAN : 32.14-E07.01.06.
3. UNIT KERJA : Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
 - a. JPT Pratama :
 - b. Administrator :
 - c. Pengawas :
 - d. Pelaksana :
 - e. Jabatan Fungsional :
4. IKHTISAR JABATAN : "Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial."
5. KUALIFIKASI JABATAN :
 - a. Pendidikan Formal : S1/ DIV S-1/D-4 Ilmu Hukum/ Ekonomi/ Manajemen/ Administrasi/ Sosial Politik/ Psikologi/ Relasi Industri/ Humaniora/ bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan instansi pembina
 - b. Pendidikan dan Pelatihan :
 - 1) Fungsional : Diklat Dasar Mediator Hubungan Industrial
 - 1) Teknis : Diklat Dasar Mediator Hubungan Industrial
 - c. Pengalaman Kerja : -
6. TUGAS POKOK

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Jumlah Hasil	Waktu Penyelesaian (Menit)	Waktu Efektif	Kebutuhan Pegawai
1	Melakukan penilaian Hubungan Industrial di perusahaan	100	100	120	72000	0.1667
2	Menyusun Peta Hubungan Industrial kabupaten/kota	100	100	120	72000	0.1667
3	Menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring sarana Hubungan Industrial di perusahaan	4	4	120	72000	0.0067
4	Merumuskan strategi pencegahan dan penanganan diskriminasi di tempat kerja	4	4	120	72000	0.0067
5	Mengidentifikasi kepesertaan program jaminan sosial	80	80	2400	72000	2.6667

6	Menyusun profil Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan	1	0	0	72000	0.0000
7	Menganalisis pelaksanaan sistem pengupahan	1	1	600	72000	0.0083
8	Menyusun kompilasi putusan Pengadilan Hubungan Industrial	1	1	600	72000	0.0083
9	Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan Sarana Hubungan Industrial di perusahaan	90	90	180	72000	0.2250
10	Melakukan pembimbingan penyusunan materi perjanjian kerja	90	90	120	72000	0.1500
11	Melakukan pembimbingan penyusunan materi Peraturan Perusahaan	90	90	120	72000	0.1500
12	Melakukan pembimbingan penerapan kebijakan pengupahan di perusahaan	90	90	120	72000	0.1500
13	Melakukan pembimbingan pembentukan dan Pengelolaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja atau koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif	90	90	120	72000	0.1500
14	Melakukan pembimbingan penerapan dan perluasan kepesertaan program jaminan sosial dan/atau penahapan kepesertaan	90	90	120	72000	0.1500
15	Melakukan pembimbingan mekanisme penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	90	90	120	72000	0.1500
16	Melakukan pembimbingan mekanisme penanganan mogok kerja atau penutupan perusahaan	90	90	120	72000	0.1500
17	Melakukan verifikasi keanggotaan organisasi pekerja di perusahaan	90	90	120	72000	0.1500
18	Melakukan deteksi dini di perusahaan	80	80	120	72000	0.1333
19	Melakukan layanan konseling teknis bidang Hubungan Industrial tingkat lanjut	80	80	30	72000	0.0333
20	"Menyusun Rumusan teknis masukan masyarakat/instansi terkait tentang hubungan industrial tingkat menengah" Rumusan bahan masukan masyarakat atau instansi tingkat menengah	1	0	0	72000	0.0000
21	Melakukan pendampingan kinerja Lembaga tripartit	2	0	0	72000	0.0000
22	Melakukan validasi data Calon Anggota Lembaga Hubungan Industrial		0	0	72000	0.0000

23	Melakukan pengendalian unjuk rasa tingkat menengah		10	120	72000	0.0167
24	Menyusun naskah penyebarluasan informasi Hubungan Industrial bagi kepentingan satuan kerja (instansi)		60	120	72000	0.1000
25	Mereviu penyelenggaraan sarana Hubungan Industrial di perusahaan		2	120	72000	0.0033
26	Mereviu penyelenggaraan program jaminan sosial		2	120	72000	0.0033
27	Melakukan evaluasi hasil penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mekanisme perundingan bipartit		10	120	72000	0.0167
28	Melakukan evaluasi Hasil penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial		10	120	72000	0.0167
29	Melakukan evaluasi penerapan Anti-Diskriminasi		10	120	72000	0.0167
30	Melakukan evaluasi penyelesaian mogok kerja, penutupan perusahaan atau unjuk rasa terkait ketenagakerjaan		10	120	72000	0.0167
31	Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		10	120	72000	0.0167
32	Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		2	120	72000	0.0033
33	Menyusun telaahan bidang Hubungan Industrial tingkat 1		2	120	72000	0.0033
34	Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan Hak tingkat sedang		10	120	72000	0.0167
35	Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan Kepentingan tingkat sedang		10	120	72000	0.0167
36	Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat sedang		10	120	72000	0.0167
37	Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang		1	120	72000	0.0017
38	Merumuskan kesepakatan mediasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tingkat sedang dalam bentuk Perjanjian Bersama		10	120	72000	0.0167

39	"Melakukan mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat menengah"		6	120	72000	0.0100
40	Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan melalui Perundingan Bipartit dan tindak lanjutnya		10	120	72000	0.0167
41	Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan melalui Mediasi atau Konsiliasi dan tindak lanjutnya		10	120	72000	0.0167
42	Melakukan supervisi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan melalui Arbitrase dan tindak lanjutnya	10	10	120	72000	0.0167
43	Melakukan supervisi hasil mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan atau unjuk rasa dan tindak lanjutnya		10	30	72000	0.0042
44	Melakukan supervisi dan layanan Penyelesaian hak para pihak pasca kesepakatan penyelesaian mogok/unjuk rasa dan putusan Arbiter/ Pengadilan Hubungan Industrial	10	10	30	72000	0.0042
Jumlah				7830		4.9721
Jumlah Pegawai						4

7. HASIL KERJA

No.	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1	Bukti Pencatatan dan Profil Hubungan Industrial di Perusahaan	100
2	Peta Hubungan Industrial kabupaten/kota	100
3	Dokumen perencanaan pembinaan sarana hubungan industrial pada perusahaan	4
4	Dokumen perencanaan bidang pencegahan dan penanganan diskriminasi	4
5	Data kepesertaan program jaminan sosial yang terverifikasi	80
6	Profil Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang terverifikasi	1
7	Data pelaksanaan sistem pengupahan	1
8	Dokumen kompilasi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang terverifikasi	1
9	Laporan hasil pembinaan sarana Hubungan Industrial di perusahaan	90
10	Laporan hasil pembinaan penyusunan materi perjanjian kerja di perusahaan	90
11	Laporan hasil pembinaan materi Peraturan Perusahaan	90
12	Laporan hasil pembinaan bidang pengupahan di perusahaan	90

13	Laporan hasil pembinaan bidang Pembentukan fasilitas kesejahteraan pekerja	90
14	Laporan hasil pembinaan bidang jaminan sosial	90
15	Laporan hasil pembinaan bidang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	90
16	Laporan hasil pembinaan terkait mogok kerja atau penutupan perusahaan (lock out).	90
17	Dokumen hasil verifikasi keanggotaan organisasi pekerja	90
18	Laporan hasil deteksi dini	80
19	Laporan pelayanan konseling teknis bidang Hubungan Industrial tingkat lanjut	80
20	Rumusan bahan masukan masyarakat atau instansi tingkat menengah	1
21	Laporan pendampingan kinerja Lembaga tripartit	2
22	Dokumen hasil validasi Calon Anggota Lembaga Hubungan Industrial	2
23	Laporan hasil pengendalian unjuk rasa tingkat menengah	10
24	"Naskah publikasi bidang Hubungan Industrial"	60
25	Dokumen hasil revidi dan rekomendasi penyelenggaraan sarana	2
26	"Dokumen hasil revidi dan rekomendasi penyelenggaraan jaminan sosial"	2
27	Dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui perundingan bipartit	10
28	Dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial	10
29	Dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penerapan Non- Diskriminasi	10
30	Dokumen hasil evaluasi penyelesaian mogok kerja, penutupan perusahaan atau unjuk rasa terkait ketenagakerjaan	10
31	Naskah petunjuk pelaksanaan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10
32	Naskah petunjuk teknis bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Soaial Tenaga Kerja	2
33	"Naskah telaahan bidang Hubungan Industrial tingkat 1"	2
34	Dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan Hak tingkat sedang	10
35	Dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat sedang	10
36	Dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat sedang	10
37	Dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat buruh tingkat sedang	1
38	Dokumen Perjanjian Bersama mediasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tingkat sedang	10
39	Dokumen mediasi pencegahan mogok kerja/ penutupan perusahaan tingkat menengah	6
40	Laporan hasil supervisi penyelesaian perselisihan melalui Perundingan Bipartit	10
41	Laporan hasil supervisi penyelesaian perselisihan melalui Mediasi atau Konsiliasi	10
42	Laporan hasil supervisi penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase	10
43	Laporan hasil supervisi pencegahan mogok kerja / penutupan perusahaan/ unjuk rasa	10
44	Laporan hasil supervisi pencegahan mogok kerja / penutupan perusahaan/ unjuk rasa	10

8. BAHAN KERJA

No.	Bahan Kerja	Digunakan Dalam Tugas
-----	-------------	-----------------------

1	Daftar Perusahaan, Form Deteksi Dini	Penilaian Hubungan Industrial di perusahaan
2	Daftar Perusahaan, Form Deteksi Dini	Penyusunan Peta Hubungan Industrial kabupaten/kota
3	Daftar Perusahaan, Form Deteksi Dini	Penyusunan rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring sarana Hubungan Industrial di perusahaan
4	Daftar Perusahaan, Form Deteksi Dini	Perumusan strategi pencegahan dan penanganan diskriminasi di tempat kerja
5	Daftar Perusahaan, Form Deteksi Dini	Identifikasi kepesertaan program jaminan sosial
6	Daftar Perusahaan, Form Deteksi Dini	Penyusunan profil Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan
7	Daftar Perusahaan, Form Deteksi Dini	Analisis pelaksanaan sistem pengupahan
8	Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung	Penyusunan kompilasi putusan Pengadilan Hubungan Industrial
9	Peraturan Perundang-undangan, Materi Pembinaan	Pembimbingan pembentukan dan pengelolaan Sarana Hubungan Industrial di perusahaan
10	Peraturan Perundang-undangan, Materi Pembinaan	Pembimbingan penyusunan materi perjanjian kerja
11	Peraturan Perundang-undangan, Materi Pembinaan	Pembimbingan penyusunan materi Peraturan Perusahaan
12	Peraturan Perundang-undangan, Materi Pembinaan	Pembimbingan penerapan kebijakan pengupahan di perusahaan
13	Peraturan Perundang-undangan, Materi Pembinaan	Pembimbingan pembentukan dan Pengelolaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja atau koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif
14	Peraturan Perundang-undangan, Materi Pembinaan	Pembimbingan penerapan dan perluasan kepesertaan program jaminan sosial dan/atau penahapan kepesertaan
15	Peraturan Perundang-undangan, Materi Pembinaan	Pembimbingan mekanisme penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
16	Peraturan Perundang-undangan, Materi Pembinaan	Pembimbingan mekanisme penanganan mogok kerja atau penutupan perusahaan
17	Data Pekerja di Perusahaan	Verifikasi keanggotaan organisasi pekerja di perusahaan
18	Daftar Perusahaan, Form Deteksi Dini	Deteksi dini di perusahaan
19	Peraturan Perundang-undangan, Materi Pembinaan	Pelayanan konseling teknis bidang Hubungan Industrial tingkat lanjut
20	Surat Pegaduan, Notulensi "	Penyusunan Rumusan teknis masukan masyarakat/instansi terkait tentang hubungan industrial tingkat menengah"
21	SK Bupati LKS Tripartit, Rekomendasi, Tata Tertib	Pendampingan kinerja Lembaga tripartit
22	Data Calon Anggota Lembaga Hubungan Industrial	Validasi data Calon Anggota Lembaga Hubungan Industrial
23	Peraturan Perundang-undangan, Materi Pembinaan	Pengendalian unjuk rasa tingkat menengah
24	Peraturan Perundang-undangan, Materi Penyebarluasan Informasi Hubungan Industrial, Isu ketenagakerjaan	Penyusunan naskah penyebarluasan informasi Hubungan Industrial bagi kepentingan satuan kerja (instansi)
25	Data Sarana Hubungan Industrial	Reviu penyelenggaraan sarana Hubungan Industrial di perusahaan
26	Data Program Jaminan Sosial	Reviu penyelenggaraan program jaminan sosial

27	Perjanjian Bersama	Evaluasi hasil penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mekanisme perundingan bipartit
28	Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Evaluasi Hasil penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial
29	Laporan Pembinaan	Evaluasi penerapan Anti-Diskriminasi
30	Laporan Pembinaan	Evaluasi penyelesaian mogok kerja, penutupan perusahaan atau unjuk rasa terkait ketenagakerjaan
31	Data Hubungan Industrial	Penyusunan naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
32	Data Hubungan Industrial	Penyusunan naskah petunjuk teknis pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
33	Data Hubungan Industrial	Penyusunan telaahan bidang Hubungan Industrial tingkat 1
34	Surat Permohonan, Risalah Bipartit, Kronologis	Mediasi penyelesaian perselisihan Hak tingkat sedang
35	Surat Permohonan, Risalah Bipartit, Kronologis	Mediasi penyelesaian perselisihan Kepentingan tingkat sedang
36	Surat Permohonan, Risalah Bipartit, Kronologis	Mediasi penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat sedang
37	Surat Permohonan, Risalah Bipartit, Kronologis	Mediasi penyelesaian perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang
38	Peraturan Perundang-undangan, Risalah Klarifikasi, Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial secara Bipartit	Perumusan kesepakatan mediasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tingkat sedang dalam bentuk Perjanjian Bersama
39	Surat Permohonan, Risalah Bipartit, Kronologis	"Mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat menengah"
40	Perjanjian Bersama	Supervisi hasil penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan melalui Perundingan Bipartit dan tindak lanjutnya
41	Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Supervisi hasil penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan melalui Mediasi atau Konsiliasi dan tindak lanjutnya
42	Keputusan Arbiter	Supervisi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan melalui Arbitrase dan tindak lanjutnya
43	Laporan Pembinaan	Supervisi hasil mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan atau unjuk rasa dan tindak lanjutnya
44	Kesepakatan Bersama	Supervisi dan layanan Penyelesaian hak para pihak pasca kesepakatan penyelesaian mogok/unjuk rasa dan putusan Arbiter/ Pengadilan Hubungan Industrial

9. PERANGKAT KERJA

No.	Perangkat Kerja	Digunakan Dalam Tugas
-----	-----------------	-----------------------

10. Tanggung Jawab

No.	Uraian
1	a. Terselenggaranya pembinaan hubungan industrial ; b. Terselenggaranya Pengembangan hubungan industrial; c. Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial.

11. WEWENANG

No.	Uraian
1	a. Meminta data sarana hubungan industrial perusahaan; b. Memberikan pembinaan hubungan industrial; c. Mengembangkan sarana hubungan industrial; d. Memanggil para pihak dan saksi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial; e. Memberikan Anjuran Tertulis dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

12. KORELASI JABATAN

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
1	Kepala Dinas	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Konsultasi/ Menerima arahan
2	Sekretaris Dinas	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Konsultasi/ Menerima arahan
3	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Konsultasi/ Menerima arahan
4	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Koordinasi dan kerjasama
5	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Konsultasi, koordinasi dan kerjasama
6	Kepala Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Koordinasi dan kerjasama
7	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	Koordinasi dan kerjasama
8	APINDO	Perangkat Daerah lainnya	Koordinasi dan kerjasama
9	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Perangkat Daerah lainnya	Konsultasi, koordinasi dan kerjasama
10	Dirjen PHI Jamsos	Kemnaker RI	Konsultasi, koordinasi dan kerjasama

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA

No.	Aspek	Faktor
-----	-------	--------

14. RISIKO BAHAYA

No.	Nama Resiko	Penyebab
-----	-------------	----------

15. SYARAT JABATAN

- a. Keterampilan Kerja :
- b. Bakat Kerja :
- c. Tempramen Kerja :
- d. Minat Kerja :
- e. Upaya Fisik :

f. Kondisi Fisik :

- 1) Jenis Kelamin :
- 2) Umur :
- 3) Tinggi Badan :
- 4) Berat Badan :
- 5) Postur Badan :
- 6) Penampilan :
- 7) Keadaan Fisik :

g. Upaya Fisik :

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : **Baik/Sangat baik**

17. KELAS JABATAN : **10**

Mengetahui Atasan Langsung

Kabupaten Purwakarta, 04 Apr 2025 10:22
Kepala Dinas

(.....)

(.....)